

PENDAMPINGAN KEPALA DESA BARU DI JAWA BARAT UNTUK PEMETAAN POTENSI DIGITALISASI PEDESAAN DALAM PROGRAM AKADEMI DESA JUARA

Dyana Chusnulitta Jatnika¹, Dimas Dwiki Jatnika², Muhamad Burhanudin³, Rizki Adam
Kurniawan⁴

^{1,2}Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran

³Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan Provinsi Jawa Barat

⁴Jabar Digital Service, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

e-mail: dyana.jatnika@unpad.ac.id¹, dimasdwikijatnika@gmail.com², handin.muhamadn@gmail.com³,
rizkiadam01@gmail.com⁴

ABSTRAK

Program pendampingan yang diselenggarakan merupakan kolaborasi antara Program Desa Digital dan Akademi Desa Juara (Aksara) Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi desa melalui digitalisasi. Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala desa baru, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa (Sekdes) di Provinsi Jawa Barat, tenaga pendidik dari Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran, dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Perwakilan para kepala desa baru tersebut diantaranya dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor. Program pendampingan ini mencakup pemaparan materi mengenai digitalisasi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta diskusi terarah untuk memetakan potensi dan tantangan digitalisasi di desa guna memaksimalkan digitalisasi layanan publik di pedesaan. Program pengabdian masyarakat tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan gagasan terkait pentingnya upaya digitalisasi di pedesaan, termasuk diantaranya ketersediaan keterbukaan informasi dan layanan publik di desa, literasi digital untuk aparatur desa, dan optimalisasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung implementasi teknologi digital di desa. Tantangan yang dihadapi oleh perwakilan aparatur desa termasuk diantaranya keterbatasan infrastruktur teknologi digital yang mendukung, keterbatasan literasi digital, dan kebutuhan regulasi tingkat kabupaten dan desa yang terukur untuk mendukung upaya transformasi digital di pedesaan. Upaya tindak lanjut disepakati antara perwakilan desa dan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat melalui naskah kesepakatan kerjasama digitalisasi desa.

Kata Kunci: Digitalisasi Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa.

ABSTRACT

The mentoring program held is a collaboration between the Digital Village Program and the Juara Village Academy (Aksara) of West Java Province, aimed at optimizing the potential of villages through digitalization. The event was attended by newly appointed village heads, village consultative body (BPD) chairs, village secretaries (Sekdes) from West Java Province, educators from the Department of Social Welfare at Universitas Padjadjaran, and local government officials from West Java Province. The representatives of the newly appointed village heads came from Cirebon City, Cirebon Regency, Indramayu Regency, Sukabumi Regency, and Bogor Regency. This mentoring program included presentations on rural digitalization and community empowerment, as well as directed discussions to map the potential and challenges of digitalization in villages, with the aim of maximizing the digitalization of public services in rural areas. The community service program resulted in an agreement on the importance of digitalization efforts in rural areas, including the availability of open information and public services in villages, digital literacy for village officials, and the optimization of infrastructure development to support the implementation of digital technology in villages. Challenges faced by the representatives of village administrations included limitations in digital technology infrastructure, digital literacy, and the need for measurable regulations at the district and village levels to support digital transformation efforts in rural areas. Follow-up actions were agreed upon between the village representatives and the West Java provincial government through a memorandum of understanding for village digitalization collaboration.

Keywords: Rural Digitalization, Village Community Empowerment

PENDAHULUAN

Teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dan dramatis dalam kehidupan dewasa ini. Keahlian dan kemampuan untuk selalu beradaptasi dan mengatasi tantangan serta kendala yang dihadapi adalah kunci dalam mengoptimalkan potensi positif dari kehadiran teknologi yang diiringi dengan mengurangi atau meminimalisir dampak negatifnya (Rohman et al., 2024). Teknologi informasi yang lebih mengutamakan dilakukan secara digital dibandingkan tenaga manusia adalah teknologi digital. Pada dasarnya, teknologi digital merupakan suatu sistem yang menghitung dengan sangat cepat dengan memproses seluruh bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris (Danuri, 2019). Media informasi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dimana akses terhadap segala bentuk informasi hampir selalu bisa didapatkan secara digital melalui internet. Hal yang sama berlaku untuk sistem pemerintahan dan birokrasi publik yang dapat terbilang menjadi wajib untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital agar tetap relevan dan efektif dalam melayani masyarakat dengan baik, karena perkembangan teknologi di dunia selalu menuju pembaharuan dengan inovasi yang tiada henti (El-Haq, 2022).

Pentingnya informasi di dalam era digital menjadikan masyarakat mengoptimalkan teknologi modern yang

dihasilkan oleh perkembangan teknologi digital. Hal tersebut tentunya memberikan berbagai dampak, salah satunya adalah munculnya berbagai layanan yang bersifat baru, baik bagi masyarakat secara umum, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah (Susanti et al., 2023). Hal tersebut juga selaras dengan pendapat dari Danuri (2019) yang mengatakan bahwa Digital Transformation atau Transformasi Digital adalah sebuah perubahan yang terjadi dalam penanganan suatu pekerjaan dengan mengoptimalkan teknologi informasi guna mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Terdapat berbagai contoh bidang yang telah melakukan transformasi tersebut seperti pendidikan dengan e-learning, lalu perbankan dengan e-banking, selanjutnya pemerintah dengan e-government, dan lain sebagainya, yang pada intinya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas suatu pekerjaan.

Namun, meski teknologi digital telah merambah kepada berbagai aspek kehidupan, masih terdapat beragam kendala dan tantangan dalam penggunaannya, terutama di wilayah pedesaan. Mulai dari keterbatasan infrastruktur digital, modal finansial, akses terhadap perangkat digital, hingga kepada kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan atau mengoptimalkan teknologi digital itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Babys et al. (2024) bahwa salah satu komponen paling penting dalam

membangun sistem desa digital adalah kekuatan pada sumber daya manusia yang tersedia, yaitu penduduk desa itu sendiri.

Kondisi tersebut seringkali menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat desa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Padahal, potensi desa untuk melakukan transformasi digital sangat besar, dan dapat mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi desa yang telah ada, atau bahkan memunculkan potensi-potensi baru lainnya yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu bentuk upaya mengoptimalkan potensi desa melalui digitalisasi adalah dengan hadirnya kolaborasi Program Desa Digital dengan Akademi Desa Juara (Aksara). Susanti et al. (2023) menemukan bahwa pelatihan teknologi digital yang dijalankan oleh masyarakat relatif berpotensi untuk memberikan dampak dan manfaat yang terbilang tinggi. Hal itu disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap dasar-dasar teknologi yang semakin kuat, baik untuk keperluan yang sifatnya pribadi maupun untuk keperluan yang bersifat profesional. Efek domino yang akan dihasilkan adalah mengurangi kesenjangan yang dimiliki antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan dalam memanfaatkan teknologi di kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu, transformasi digital bukan hanya berbicara tentang infrastruktur dan akses terhadap teknologi digital, melainkan pendampingan terhadap sumber daya manusia yang dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan digitalisasi dengan mengoptimalkan teknologi digital yang akan menunjang kehidupan keseharian bahkan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara masif. Seperti yang disampaikan oleh Novianti et al. (2024) dalam penelitiannya bahwa tantangan dalam mengadopsi teknologi antara lain aksesibilitas teknologi, biaya investasi di awal, serta pengetahuan dan keterampilan untuk mengaplikasikannya secara efektif. Vial (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa transformasi digital adalah tentang mengadopsi teknologi disruptif untuk meningkatkan produktivitas, penciptaan nilai, dan kesejahteraan sosial.

METODE

Program Desa Digital berkolaborasi dengan Akademi Desa Juara (Aksara) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah Manusia (BPSDM) Cimahi pada 28 Mei 2024. Program tersebut juga melibatkan kepala desa (Kades) baru, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta sekretaris desa (Sekdes) di Jawa

Barat. Adapun, para peserta yang hadir dalam acara tersebut berbagi beragam tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses digitalisasi di desa, terutama dalam keterbatasan infrastruktur dan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memahami dan memiliki kapasitas terkait teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Program Desa Digital yang berkolaborasi dengan Akademi Desa Juara (Aksara) dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Cimahi. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta sekretaris desa (Sekdes) di Jawa Barat, yang secara aktif berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kapasitas digital desa. Salah satu tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh para mitra, khususnya terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang cukup dalam mengoptimalkan teknologi digital.

Pada kegiatan tersebut, peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai desa menyampaikan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi. Terdapat dua kendala dan tantangan utama, yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur

internet yang tersedia di daerah pedesaan. Masih banyak desa, terutama di daerah terpencil, yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses internet yang memadai. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah lokasi secara geografis yang tidak terjangkau oleh penyedia layanan internet, lalu prioritas pembangunan di wilayah pedesaan yang belum terlalu optimal, dan juga biaya instalasi jaringan ataupun infrastruktur lainnya yang seringkali dianggap tidak sebanding dengan jumlah pengguna yang ada di suatu wilayah. Akibatnya, masyarakat di beberapa daerah tertentu masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses internet dan mengoptimalkan teknologi digital pada kehidupan kesehariannya.



Gambar 1. Kepala Desa menyampaikan Tanggapan Program

Keterbatasan tersebut tentunya berdampak kepada hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, peluang ekonomi, akses terhadap informasi, hingga ke pelayanan publik. Contohnya, dalam konteks pendidikan seringkali siswa di pedesaan tidak bisa mengikuti pembelajaran

yang sifatnya dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau *online*, lalu sulitnya akses terhadap materi-materi pembelajaran yang tersedia di dunia digital, dan lain sebagainya. Pada sektor ekonomi, para pelaku usaha belum bisa mengoptimalkan usahanya di dunia digital dalam memasarkan produknya secara lebih meluas. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan internet juga menghambat pemerintah setempat untuk menjalankan sistem pemerintahan khususnya pelayanan publik yang efektif dan efisien, dengan contoh *e-government* dengan sistem administrasi berbasis teknologi digital.

Oleh sebab itu, infrastruktur dan akses terhadap teknologi digital merupakan salah satu hal penting dan mewakili hampir seluruh peserta yang menjadi perwakilan dari desa-desa yang ada di Jawa Barat. Adanya infrastruktur dan akses yang memadai terhadap teknologi digital, tentunya masyarakat desa memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dalam berbagai sektor melalui pengoptimalan penggunaan teknologi digital di kehidupan keseharian.

Kendala dan tantangan yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital. Meskipun teknologi digital sudah semakin berkembang pesat dan dapat memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat desa, namun jika tidak ada atau terbatasnya sumber daya

manusia yang memiliki keterampilan digital maka potensi pemanfaatan teknologi digital pun akan terhambat. Hal tersebut tentunya dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari rendahnya pengetahuan akan teknologi digital, rendahnya keterampilan digital, hingga kepada terbatasnya akses terhadap pendidikan maupun pelatihan terkait teknologi digital. Sari et al. (2021) mengatakan dalam penelitiannya bahwa kemampuan untuk menguasai teknologi informasi seharusnya dimiliki oleh masyarakat desa, khususnya para remaja. Hal tersebut karena kemajuan dan perkembangan teknologi menuntut kita untuk menguasai ilmu dan keterampilan di bidang teknologi informasi.



Gambar 2. *Focus Group Discussion* antar Kepala Desa dan Kepala BPD Desa

Sebagian masyarakat desa masih memiliki pengetahuan yang terbatas akan teknologi digital. Masih banyak yang belum familiar dengan konsep-konsep dasar teknologi, mulai dari perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), hingga kepada cara mengakses dan mengoptimalkan internet. Adanya

keterbatasan tersebut menjadikan hambatan bagi masyarakat dalam memulai langkah baru menuju transformasi digital, seperti melakukan pembayaran secara *online*, mengakses informasi secara *online*, menggunakan aplikasi untuk komunikasi jarak jauh, hingga kepada hal-hal yang sifatnya meningkatkan produktivitas bisnis seperti pemasaran dan penjualan produk secara *online*. Keterbatasan pengetahuan tersebut bukan hanya berdampak pada kehidupan keseharian dalam jangka pendek, melainkan masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan akan teknologi digital juga terhambat dalam memahami pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam jangka panjang. Contohnya adalah peningkatan efisiensi dalam pekerjaan sehari-hari, penghematan waktu, efektivitas tenaga, hingga kepada akses yang lebih luas terhadap informasi dan peluang ekonomi atau bisnis lainnya. Hal tersebut merupakan permasalahan yang sering kali muncul di pedesaan, seperti yang ditemukan oleh Arsana et al. (2021) dalam penelitiannya bahwa dari hasil identifikasi yang dilakukan di kantor Desa Kuku, terdapat kendala yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, yaitu masih kurangnya kemahiran beberapa sumber daya manusia yang ada di kantor Desa Kuku dalam mengoperasikan dan mengoptimalkan teknologi komputer dan penggunaan teknologi informasi.

Selain dari keterbatasan akan pengetahuan dasar terkait teknologi digital, keterampilan digital juga menjadi salah satu keterbatasan dalam proses digitalisasi desa. Sebagian besar masyarakat desa belum terbiasa untuk menggunakan dan berinteraksi langsung dengan perangkat digital secara efektif. Contohnya adalah masih banyak masyarakat desa yang belum terlalu terbiasa untuk menggunakan *spreadsheet*, *google docs*, bahkan mungkin beberapa diantaranya belum terlalu terbiasa juga pada hal-hal sederhana seperti menghubungkan perangkat pada internet yang tersedia. Maka dari itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital secara lebih *advance* masih menjadi tantangan dalam proses digitalisasi desa. Keterampilan digital menjadi salah satu komponen penting dalam mengoptimalkan teknologi digital yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tanpa keterampilan digital yang memadai, masyarakat desa akan merasa kesulitan untuk mengakses informasi yang lebih luas secara *online*, mengunduh materi pembelajaran sekolah secara daring (dalam jaringan), apalagi memberikan pelayanan publik secara *online* yang berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu layanan.

Masalah lain yang memperburuk kesenjangan kapasitas teknologi antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan adalah akses terhadap pelatihan atau

pendidikan teknologi digital. Meskipun sudah banyak tersedia platform ataupun lembaga yang menyediakan pelatihan teknologi digital, namun akses tersebut belum terlalu banyak menjangkau masyarakat desa. Terlebih, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat desa juga menjadi salah satu tantangan, ketika masyarakat desa cenderung menghabiskan waktunya untuk fokus pada kegiatan sehari-hari seperti berkebun, bertani, mengurus ternak, dan lain sebagainya. Selain itu, biaya pelatihan teknologi digital seringkali dianggap terlalu mahal sehingga menjadi kendala. Maka dari itu, masih banyak masyarakat desa yang tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari teknologi digital dengan memadai.

Selanjutnya, salah satu tantangan yang muncul akibat dari beberapa kendala dan tantangan sebelumnya adalah keterbatasan jumlah pelatih atau penggerak lokal pada bidang teknologi digital di desa. Masih belum terlalu banyak individu yang menguasai pengetahuan dan keterampilan teknologi digital secara menyeluruh dan efektif di suatu desa. Maka dari itu, ketika ada kebutuhan pelatihan atau peningkatan kapasitas terkait teknologi digital, sering kali tidak ada tenaga ahli atau individu yang memadai untuk dapat menyelenggarakan pelatihan tersebut secara efektif. Karena keterbatasan jumlah, jika ada pun terkadang individu tersebut jarang berada di desa asalnya.



Gambar 3. Pemaparan materi digitalisasi perdesaan

Salah satu aktivitas selanjutnya adalah pemaparan materi digitalisasi perdesaan dengan pembahasan utama terkait urgensi literasi digital dan upaya memaksimalkan potensi desa melalui teknologi digital. Desa Digital merupakan salah satu perwujudan dari pengoptimalan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi potensi desa dengan bantuan teknologi melalui internet, aplikasi digital, dan lain sebagainya dalam berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik. Seperti yang disampaikan oleh Afrianto et al. (2022) dalam penelitiannya bahwa jawaban dari para responden yaitu para pengguna sistem pada akhir pelatihan yang diselenggarakan menunjukkan bahwa aplikasi digital desa, aplikasi aparat dan web portal desa mampu membantu fungsi dan peran perangkat desa, mudah digunakan, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja.

Pembahasan tersebut menggambarkan dan menawarkan solusi praktis yang dapat

diimplementasikan. Pertama adalah pelatihan literasi digital, dimana pelatihan tersebut akan sekaligus mendampingi masyarakat desa untuk lebih melek dan memahami penggunaan dan pengoptimalan teknologi digital dalam kehidupan keseharian. Contoh yang diberikan adalah pemerintah setempat dapat melakukan kolaborasi bersama dengan akademisi atau universitas, di mana mahasiswa atau jika memungkinkan dosen langsung memberikan pelatihan dasar terkait pemanfaatan teknologi digital.

Selanjutnya, hal lainnya yang dapat dilakukan dan diupayakan adalah peningkatan infrastruktur dengan kolaborasi bersama sektor swasta seperti operator telekomunikasi untuk memperluas jaringan internet di wilayah pedesaan. Pemerintah setempat dapat menjalin koordinasi dan kerjasama dengan provider untuk membangun menara BTS di daerah yang belum terjangkau internet. Jika hal tersebut dilakukan, maka otomatis masyarakat setempat pun akan terpacu untuk belajar mengoptimalkan internet dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, dengan begitu sektor-sektor perekonomian masyarakat pun akan ikut terdorong dan maju sehingga secara tidak langsung akan membuka lapangan pekerjaan yang baru, mendorong kreativitas masyarakat, memperluas jangkauan usaha atau bisnis masyarakat setempat, meningkatkan aksesibilitas masyarakat setempat terhadap pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan,

keduanya dapat dikolaborasikan bersama, misalnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi, di mana pemerintah menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan atau bahkan fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, lalu swasta mendukung pada bagian perangkat teknologi, dan akademisi dapat berperan sebagai pemateri atau sebagai orang-orang yang memberikan pelatihan.

Namun, semua hal tersebut tentunya perlu ditopang dengan sangat kuat oleh partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Dalam penelitiannya, Agustana (2020) mengatakan bahwa dalam Model *Locality Development* dari Jack Rothman, perubahan dalam masyarakat lokal dapat berjalan secara maksimal jika melibatkan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, baik dalam tahap penentuan atau perencanaan maupun hingga tahap pelaksanaan perubahan. Karena keberhasilan digitalisasi desa atau transformasi digital dari suatu desa bukan hanya mengandalkan ketersediaan infrastruktur teknologi, melainkan partisipasi aktif dari masyarakat yang menggunakannya. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan karena akan mempengaruhi seluruh lini dan sektor dinamika sosial dan ekonomi suatu wilayah. Semakin banyak individu atau kelompok yang berpartisipasi aktif atas kemajuan teknologi digital di daerahnya, maka akan semakin masif dan meluas dampak yang

dapat dihasilkan. Karena warga yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan digital diharapkan mampu mengajarkan kembali kepada orang-orang di sekitarnya yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan tersebut, sehingga menciptakan efek domino yang akan mempercepat adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jika suatu wilayah sudah memiliki elemen-elemen tersebut, ditopang dengan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar, maka pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi digital bukan hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat, melainkan dapat mendorong perkembangan ekonomi berbasis potensi lokal yang lebih berdaya saing. Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari Kurnia et al. (2023) dalam penelitiannya bahwa sifat partisipatif dari proyeknya yang memberdayakan masyarakat desa untuk berbagi cerita dan menjadi *support system* yang mendukung inklusi digital. Keterlibatan dan partisipasi aktif tersebut dapat menjadi model bagi inisiatif berbasis komunitas di masa mendatang.



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi

Salah satu aktivitas yang memicu interaksi aktif antara para pemateri dengan

para peserta adalah sesi diskusi melalui tanya jawab yang dilakukan pada akhir kegiatan. Terdapat beragam topik yang diajukan dan dibahas oleh para peserta, mulai dari tantangan infrastruktur dan akses teknologi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, kolaborasi lintas sektor, implementasi teknologi dalam pemerintahan desa, hingga kepada berbagi pengalaman dan praktik. Sesi tanya jawab memiliki fungsi yang penting dalam sebuah kegiatan, beberapa diantaranya adalah untuk mengklarifikasi informasi, di mana peserta dapat meminta penjelasan lebih lanjut jika ada informasi yang dirasa masih ambigu atau belum terlalu jelas. Sehingga diharapkan pemahaman yang didapatkan oleh para *audience* atau peserta benar-benar utuh dan komprehensif, meminimalisir adanya kesalahpahaman yang bukan tidak mungkin menjadi miskomunikasi yang beruntun. Fungsi selanjutnya adalah menyelesaikan permasalahan praktis, contohnya adalah ketika peserta membagikan pengalaman atau cerita yang spesifik yang sedang atau pernah dihadapi di lapangan, maka pemateri dapat langsung memberikan solusi praktis atau solusi yang sifatnya implementatif secara langsung yang relevan dengan situasi nyata yang disampaikan oleh peserta.

Selanjutnya, fungsi dari sesi tanya jawab dan diskusi adalah meningkatkan interaksi dan keterlibatan antara pemateri dengan peserta maupun antara peserta dengan

peserta lainnya. Sesi ini mendorong peserta untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan, sehingga para peserta tidak hanya menerima informasi dan menjadi pendengar pasif, melainkan menjadi partisipan yang aktif dan diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan semangat untuk mendukung tujuan yang sedang ingin dicapai. Kontribusi dalam diskusi juga dapat membuka sudut pandang dan memancing kreativitas berpikir dari setiap peserta yang hadir. Lalu, sesi ini juga menjadi ajang bagi para peserta untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran, karena sering kali pendapat dan cerita yang dibagikan oleh peserta dapat berkorelasi atau memiliki kemiripan dengan peserta lainnya, sehingga terkadang peserta satu dengan peserta lainnya dapat mendapatkan pembelajaran yang dapat diaplikasikan di masing-masing desa. Hal tersebut juga membuka peluang bagi para peserta untuk belajar dari contoh kasus nyata yang mungkin tidak selalu didapatkan dalam materi presentasi oleh para pemateri. Terakhir, salah satu fungsi penting dari sesi tanya jawab dan diskusi adalah terbukanya peluang kolaborasi. Pertanyaan dan diskusi yang dilontarkan sering kali menyoroti kebutuhan akan kerja sama antara berbagai pihak. Maka dari itu, jika ada kecocokan dan kesesuaian kebutuhan serta kepentingan, maka hal tersebut dapat menjadi peluang kerja sama atau kolaborasi. Tidak hanya antara peserta dengan peserta lainnya,

melainkan antara peserta dengan berbagai pihak lintas sektor seperti pemerintah, swasta, media, akademisi, dan pihak-pihak eksternal lainnya.



Gambar 5. Foto Bersama

Program Desa Digital dan Akademi Desa Juara (Aksara) merupakan sebuah inisiatif dengan tujuan memberdayakan desa-desa yang ada di Jawa Barat melalui proses digitalisasi, selaras dengan visi membangun desa digital yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini bukan hanya berfokus pada pengenalan teknologi, melainkan mendorong para partisipan untuk mengadopsi teknologi secara menyeluruh dan menjadi *local champion* di daerahnya masing-masing sehingga dapat mengoptimalkan berbagai sektor kehidupan mulai dari perekonomian, sosial, pendidikan, hingga ke pelayanan publik. Seperti yang disampaikan oleh Babys et al. (2024) dalam penelitiannya bahwa unsur pokok yang mendorong pembangunan desa digital adalah pemerintah desa sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola dan mengatur implementasi program digital. Digitalisasi desa merupakan sebuah proses

untuk memindahkan informasi sehingga dapat diakses oleh penduduk setempat bahkan masyarakat eksternal lainnya. Dalam program tersebut akan terlihat bahwa segala pelayanan publik desa dapat diakses secara digital, bahkan terdapat potensi pengembangan ekonomi desa melalui pemasaran digital dan inovasi bisnis desa.

Untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh, maka terdapat setidaknya dua komponen yang perlu diperhatikan. Pertama, infrastruktur dan akses terhadap teknologi digital, seperti jaringan dan perangkat yang dapat digunakan. Karena kehadiran atau ketersediaan infrastruktur yang memadai tentunya akan sangat bermanfaat sebagai modal awal bagi masyarakat desa untuk memulai langkah baru dalam mengoptimalkan teknologi di kehidupan kesehariannya. Kedua, yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan digital. Pengetahuan terkait teknologi digital akan sangat dibutuhkan untuk seseorang dapat mengetahui secara pasti fungsi dan peran dari setiap teknologi yang akan digunakan. Hal tersebut tentunya perlu ditopang dengan keterampilan yang sudah terasah. Contoh paling sederhana adalah menghubungkan perangkat seperti *smartphone* atau *laptop* dengan internet, lalu mengoperasikan aplikasi-aplikasi sederhana seperti *Microsoft Word*, *Excel*, *Power Point*, *Spreadsheet*, *Google*

Docs, *Google Drive*, atau bahkan aplikasi-aplikasi yang lebih kompleks dan profesional yang biasanya mengarah kepada penunjang usaha dan bisnis. Dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan digital, ditambah dengan infrastruktur yang memadai, maka transformasi digital menjadi lebih tinggi kemungkinan berhasilnya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah partisipasi aktif dari setiap lapisan masyarakat di suatu wilayah atau desa. Dalam penelitiannya, Zahra et al. (2024) mengatakan bahwa faktor yang mendukung digitalisasi desa antara lain fasilitas infrastruktur seperti listrik, internet, satelit, dan lain sebagainya, lalu ketersediaan perlengkapan seperti perangkat komputer dan *gadget*, lalu sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam teknologi digital, dan terakhir adalah aspek lainnya seperti lingkungan, budaya, geografi, dan lain sebagainya.

Masyarakat yang dapat memunculkan kesadaran untuk berpartisipasi aktif cenderung akan lebih cepat dalam mengadopsi hal-hal baru termasuk penerapan dan pengoptimalan teknologi digital ke dalam kehidupan keseharian. Karena akan menjadi tidak efektif dan efisien jika modal infrastruktur dan sumber daya manusia telah lengkap, namun tidak didampingi dengan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Hal tersebut juga tentunya akan menghambat kolaborasi lintas sektor yang berpotensi mempercepat dan

meningkatkan tingkat keberhasilan transformasi digital untuk desa digital yang inklusi dan berkelanjutan. Bahkan, jika memungkinkan partisipasi aktif melibatkan berbagai sektor yang dapat saling mendukung, seperti pemerintah setempat, swasta, komunitas, akademisi, hingga media. Kolaborasi *pentahelix* dapat menjadi model yang ideal bagi suatu desa untuk melaksanakan transformasi digital. Seperti yang disampaikan oleh Tabrizi et al. (2019) dalam penelitiannya bahwa transformasi digital yang dilakukan dengan berhasil karena para pemimpinnya kembali ke dasar, yaitu fokus pada perubahan pola pikir para anggotanya serta budaya organisasi sebelum memutuskan teknologi atau alat digital apa yang akan dioptimalkan dan dimanfaatkan. Dengan kata lain, visi anggota akan masa depan organisasi yang mendorong pemilihan teknologi, bukan sebaliknya.

Program pendampingan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk terus mendukung transformasi digital pada desa-desa yang ada di Jawa Barat. Terutama dalam upaya memaksimalkan potensi desa melalui pemberdayaan *local champions*, mengingat yang dihadirkan untuk mewakili desa adalah kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sekretaris desa (Sekdes). Ketiga tokoh tersebut dapat dikatakan sebagai tombak yang dapat menggerakkan suatu desa, tentunya dengan wewenang yang dimiliki

diharapkan dapat membawa perubahan dan dampak yang positif secara masif dan inklusif. Selain itu, para partisipan diharapkan dapat menyebarluaskan semangat dan wawasan akan transformasi digital kepada seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Dengan begitu, tujuan untuk menciptakan desa digital yang inklusi dan berkelanjutan menjadi lebih cepat tercapai. Menjadi sebuah harapan besar bahwa kegiatan ini dapat menjadi pemantik bagi para partisipan untuk dapat memanfaatkan teknologi sehingga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Penerapan dan pengoptimalan teknologi digital dalam jangka panjang juga akan membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Meskipun begitu, kegiatan ini saja tidak cukup untuk membangun kesadaran akan partisipasi aktif dari masyarakat secara umum. Perlu proses dan pendampingan yang berkelanjutan dan konsisten untuk menumbuhkan rasa memiliki dan keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan bersama. Seperti yang dikatakan oleh Riyanto dan Kovalenko (2023) dalam penelitiannya bahwa partisipasi masyarakat bukanlah hal yang mudah dilakukan karena terdapat berbagai jenis rintangan dan tantangan yang perlu dihadapi. Contohnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi, kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, serta

perbedaan kepentingan dan kebutuhan dari setiap individu yang ada di suatu masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Optimalisasi potensi perdesaan melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi penting untuk diperhatikan di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Era digital saat ini tidak dipungkiri mendorong ragam lapisan masyarakat untuk dapat capak beradaptasi dan terampil dalam upaya memaksimalkan potensi dan meminimalisir risiko dalam segala bidang, termasuk ekonomi dan sosial. Peran kepala desa salah satunya menjadi penting guna meminimalisir *gap* pemanfaatan teknologi digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Program pendampingan yang diselenggarakan telah membuahkan kesepakatan hasil terkait pemetaan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan oleh para perwakilan peserta yang sekaligus menjadi salah satu bagian dari implementator digitalisasi desa. Beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya digitalisasi perdesaan diantaranya adalah keterbatasan infrastruktur digital, keterbatasan sumber daya manusia yang cakap dalam pemanfaatan teknologi digital, kebutuhan kolaborasi untuk memaksimalkan potensi anggaran pembangunan desa di ranah teknologi digital, dan dukungan regulasi lokal.

Di samping itu, kolaborasi lintas sektor juga menjadi buah kesepakatan diskusi diantara para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya kolaborasi yang diperlukan oleh pemerintah desa bersama dengan pemerintah kab/kota dan provinsi, komunitas lokal, akademisi, media, dan lapisan masyarakat lainnya. Setiap aktor yang terlibat akan memiliki peran dan fungsi strategis dalam mendukung proses transformasi digital, mulai dari penyediaan infrastruktur, dukungan kebijakan, hingga upaya pendampingan literasi digital.

REFERENSI

- Afrianto, I., Suryana, T., & Atin, S. (2022). Pendampingan Sistem Layanan Publik Desa Digital Desa Ciwaruga Dan Desa Cigugur Girang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat TEKNO*, 3(2), 84-90.
- Agustana, P. (2020). Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Dalam Pembangunan Sosial. *Locus*, 12(1), 60-69.
- Arsana, I. N. A., Wulandari, D. A. P., Pratistha, I., Waas, D. V., & Meinarni, N. P. S. (2021). Pelatihan dasar komputer dan teknologi informasi bagi perangkat Desa Kukuh. *Jurnal Widya Laksmi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 20-25.
- Babys, S. A., Prayitno, E., & Benu, E. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Desa Digital Indonesia. *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)*, 6(1).
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal ilmiah infokam*, 15(2).

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 5 No. 2	Hal: 85-98	Agustus 2024
--	--	--------------	------------	--------------

- El-Haq, I. M. (2022). Penerapan Teknologi Informasi Dalam Birokrasi Publik di Kantor Desa Kebonagung. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 2(01), 99-104.
- Novianti, F. A., Nursetiawan, I., Sobari, M., Risnawati, R., & Saputra, U. I. (2024). Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya. *Manfaat: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(3), 52-59.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388.
- Rohman, A., Asbari, M., & Rezza, D. (2024). Literasi digital: Revitalisasi inovasi teknologi. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 6-9.
- Sari, L. I., Probonegoro, W. A., Supardi, S., & Romadiana, P. (2021). Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pelatihan Penggunaan Teknologi Informasi di Desa Air Anyir. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 597-602.
- Susanti, P. A., Hadjaat, M., Wasil, M., & Susilawati, A. D. (2023). Meningkatkan Literasi Teknologi di Masyarakat Pedesaan Melalui Pelatihan Digital. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(2), 12-21.
- Tabrizi, B., Lam, E., Girard, K., & Irvin, V. (2019). Digital transformation is not about technology. *Harvard business review*, 13(March), 1-6.
- Vial, G. (2021). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Managing digital transformation*, 13-66.
- Zahra, A., Agustini, T. D., Andari, A. S. M., & Rachman, I. F. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL DI MASYARAKAT DESA: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU TERWUJUDNYA SDGS 2030. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 93-99.